



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2025



KECAMATAN SELOREJO



Jln. Raya Selorejo No.27
Selorejo-Blitar Kode Pos 66192



kecamatan.selorejo@gmail.com



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan HidayahNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selorejo tahun 2025 telah selesai kami susun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Tahun 2025 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /Kebijakan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selorejo Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Selorejo, 26 Januari 2026

CAMAT SELOREJO,



AGUNG NUGROHO SUTAMAT, S.E.M.M

Pembina

NIP. 19780825 200212 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar tahun 2025, dapat secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : *“Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan”*, dengan indikator kinerja utama : *Presentase desa Mandiri di Kecamatan”*. *Target Kinerja 40 % dan Realisasi Kinerja 10 % dan Capaian Kinerja 25 %*

Sasaran 2 : *“Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum ”*, dengan indikator kinerja utama : *Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan ”*. *Target Kinerja 7 dan Realisasi Kinerja 6 dan Capaian Kinerja 116 %*.

Sasaran 3 : *“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah”*, dengan indikator kinerja utama : *Nilai Sakip”*. *Target Kinerja 68,96 dan Realisasi Kinerja 68,40 dan Capaian Kinerja 99 %*

Evaluasi atas pencapaian kinerja keempat sasaran menunjukkan nilai positif dengan realisasi target kinerja tahun 2025. Akan tetapi capaian tersebut dicapai bukan tidak dengan adanya permasalahan. Permasalahan-permasalahan dalam tahun 2025 dapat diminimalisir dengan adanya manajemen risiko dan langkah-langkah strategi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
	6
A. Penjelasan Umum Organisasi	18
B Aspek Strategis Organisasi	25
B. Dasar Hukum	26
C. Sistematika	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
	28
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	31
B. Perencanaan Anggaran Tahun 2025	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A Capaian Kinerja Organisasi	32
1. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	32
2. Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	39
3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	46
B Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	64
A Kesimpulan	64
B Pemecahan Masalah	65
LAMPIRAN- LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

No.Bab	Uraian Tabel	Hal
BAB.I		
Tabel.1.1	Data ASN Kecamatan Selorejo tahun 2025	17-18
Tabel 1.2	Isu Strategis Kecamatan Selorejo	19-23
Tabel 1.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar	24
BAB.II		
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	29
Tabel 2.3	Rincian Anggaran Tahun 2025	32
BAB.III		
Tabel 3.1	Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	33
Tabel 3.2	Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	34
Tabel 3.3	Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan terhadap target akhir Renstra	34
Tabel: 3.4	Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/ Kab/Kota Tetangga	34
Tabel 3.5	Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	36
Tabel 3.6	Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	37-38
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	40
Tabel 3.8	Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum	40
Tabel.3.9	Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan terhadap target akhir Renstra	41
Tabel 3.10	Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga	41
Tabel 3.11	Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum	43
Tabel 3.12	Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten	44-45
Tabel 3.13	Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	46
Tabel 3.14	Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	47
Tabel 3.15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD terhadap target akhir Renstra	47
Tabel 3.16	Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga	48
Tabel 3.17	Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	49-51
Tabel 3.18	Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	52-55
Tabel 3.19	Realisasi Keuangan	57-62
BAB. IV		
Tabel 4.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	64
Tabel 4.2	Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja	64-65
Tabel 4.3	Rencana Tindak Lanjut	65-66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1,1	Struktur Organisasi Kecamatan Selorejo	17
Gambar 1.2	Cascading Kecamatan Selorejo	24

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian Kinerja Instansi pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 Kecamatan Selorejo sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) di Kecamatan Selorejo Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau tingkat capaian kinerja serta kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mendukung visi misi Bupati Blitar dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

A. Penjelasan Umum Organisasi

Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan pada Bidang Urusan Pemerintahan Umum; Pelayanan Publik; Pemberdayaan Masyarakat; dan Ketentraman dan Ketertiban

Melalui Peraturan Daerah di atas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan tugas kecamatan adalah:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan/ atau Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan Sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan dan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan Wilayah;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik;
- f. Penyusunan laporan Kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, maka disusun struktur organisasi. Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Seksi teknis. Adapun Susunan organisasi Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Susunan oraganisasi Kecamatan terdiri atas

1. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - b. Sumbagian Umum dan Kepegawaian
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pelayanan Publik
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Berikut tugas dan fungsi Sekretariat dan Perangkat Kecamatan dalam melaksanakan jangungjawabnya:

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan. untuk menjalankan tugas sekretariat, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;

- c. pengoordinasian penyusunan penetapan kinerja
 - d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - e. pengoordinasian urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
 - f. verifikasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan/ desa dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan dan/ a tau Desa;
 - g. pengoordinasian inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kecamatan;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - i. verifikasi pengelolaan dan administrasi anggaran dan retribusi;
 - j. verifikasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - k. verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan minimal;
 - n. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan publik;
 - o. fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
 - p. pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - q. pengoordinasian penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - r. evaluasi laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; dan
 - s. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Camat.
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan bertugas:

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi, pelaporan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut sub bagian penyusunan program dan keuangan mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja;
- b. menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. menyusun penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan publik;
- f. menyusun pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- g. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. merencanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- i. merencanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- j. menyusun surat pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- m. menyusun administrasi pembayaran gaji pegawai;
- n. menyusun laporan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
- o. menyusun laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- p. menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan

ketatausahaan,kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugs pokok tersebut sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- b. melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- d. melaksanakan kehumasan, keprotokolan, dan keputakaan;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. melaksanakan pengaduan masyarakat
- g. melaksanakan dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- h. melaksanakan tugas lain yang di ebrikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

4. Seksi pemerintahan

Seksi pemerintahan melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan ditingkat kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. mengoordinasikan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. mengoordinasikan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- d. memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/ atau Desa;
- e. memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah/kepala Desa dan perangkat Kelurahan dan/atau Desa;

- f. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi keagrariaan dan pendataan kependudukan;
- h. mengoordinasikan dan mengevaluasi intensifikasi pajak bumi dan bangunan;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pemerintahan;
- j. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- k. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa;
- l. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- m. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- n. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan Desa dan forum musyawarah Kelurahan atau sebutan lainnya;
- o. memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- p. memfasilitasi pelaksanaan tugas, kewajiban lembaga kemasyarakatan; fungsi dan memfasilitasi kerja sama antar Kelurahan dan/atau Desa dan kerja sama Kelurahan dan/ atau Desa dengan pihak ketiga;
- q. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan/ atau Desa;
- r. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

5. Seksi Pelayanan Publik bertugas:

Seksi pelayanan publik mempunyai tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan public dikecamatan. Untuk

melaksanakan tugas pokok seksi pelayanan publik mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- b. menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas di Kecamatan;
- d. menyusun pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. mengoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- g. mengoordinasikan dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- h. memberikan pertimbangan teknis, legalisasi suratsurat yang dibutuhkan masyarakat;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan publik;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
- l. Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas:

6. Seksi pemberdayaan masyarakat

Seksi pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan bidang pemberdayaan masyarakat di kecamatan. Untuk melaksanakan tugasnya seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan/ atau desa dan Kecamatan;
- c. memfasilitasi pengoordinasian keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- e. memfasilitasi pengembangan kemasyarakatan; lembaga
- f. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- g. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Kelurahan dan/atau desa; h. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan desa; 1. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; J. memfasilitasi pendampingan desa di wilayahnya; k. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan ketentraman dan ketertiban

di tingkat kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- b. Memfasilitasi pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- c. Memfasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang undangan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan kepolisian Negara dan/atau tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan perundang undangan;
- g. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- h. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban kecamatan dan kelurahan dan/atau desa
- j. Menyelenggarakan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- k. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- l. Melaksanakan standart pelayanan minimal (SPM) di bidang ketentraman dan ketertiban;
- m. Mengerfaluasi standart pelayanan minimalis (SPM) di bidang ketentraman dan ketertiban;

- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikaan olej camat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

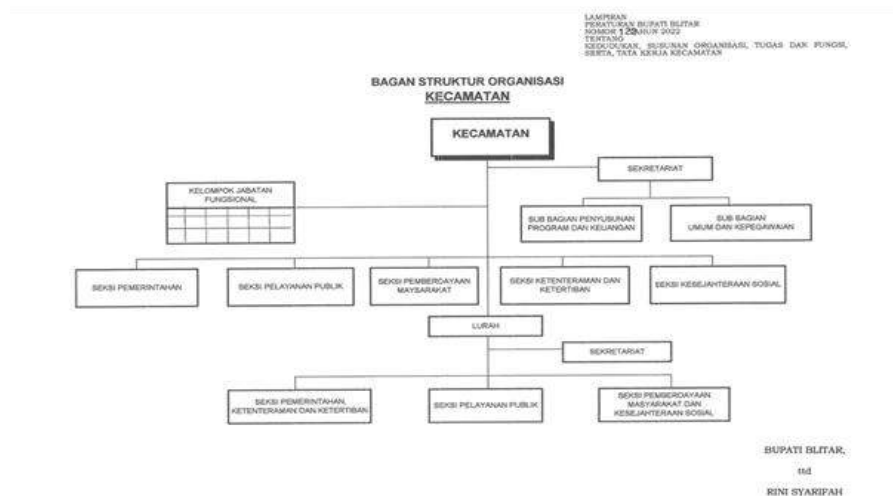
Seksi kesejahteraan sosial melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan kesejahteraan masyarakat di kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok, seksi kesejahteraan masyarakat di kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok, seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/ atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
- f. menyelenggarakan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
- g. melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- h. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- i. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- j. mengoordinasikan pembinaan olah pemberian bantuan sosial, raga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
- k. memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- l. melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial;

- m. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang kesejahteraan masyarakat;
- n. mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi. Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh Camat dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Selorejo



Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 16 Orang yang terdiri dari ASN sebanyak 14 Orang dan Non ASN sebanyak 2 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.1.1 Data ASN Kecamatan Selorejo tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah
1	Camat	1 Orang
2	Sekretaris Kecamatan	1 Orang
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1 Orang
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	0 Orang
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	1 Orang

7	Kepala Seksi Pelayanan Publik	1 Orang
8	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	1 Orang
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Orang
10	Penelaah Teknis Kebijakan (Kecamatan)	1 Orang
11	Pengolah Data dan Informasi (Kecamatan)	1 Orang
12	Pengadministrasi Perkantoran (Pemerintahan/ Kecamatan)	1 Orang
13	Penata Layanan Operasional (Kecamatan)	1 Orang
14	Operator Layanan Operasional (Kecamatan)	1 Orang
15	Pengelolaan Umum Operasional (Kecamatan)	1 Orang
16	Non ASN	2 Orang
	Total	16 Orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Selorejo

B. Aspek Strategis Organisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam dokumen perencanaan 5 tahun tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam pencapaian misi pembangunan Kabupaten Blitar yaitu **pada misi III** yaitu **“Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat”** Sasaran ke I yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** dengan indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat**.

Dalam pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Selorejo dapat diuraikan permasalahan pembangunan/isu strategis utama yang dihadapi perangkat daerah sebagaimana disampaikan dalam Rencana Strategis Kecamatan Selorejo tahun 2025-2029 yaitu:

Tabel 1.2
Isu Strategis Kecamatan Selorejo

NO	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Komposisi Penduduk menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar sedang berada pada periode bonus demografi Dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif.	Belum Optimalnya kualitas sumber daya manusia	Angka putus sekolah yang masih tinggi	Pergeseran Demografi Global Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%)	Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)	Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	Masih relatif tingginya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja	Tingkat kemiskinan masih tinggi	Perkembangan Teknologi Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini	Kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan

NO	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
		serta tingkat kemiskinan dan kesenjangan masih relatif tinggi				dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program program ekonomi dan kewirausahaan serta program program yang efektif untuk mengatasi	

NO	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
						kemiskinan	
3	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan.	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Peningkatan ekonomi inklusif dan pemberdayaan masyarakat
4	Infrastruktur Kabupaten Blitar memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, terutama pembangunan	Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Kualitas dan kuantitas Infrastruktur persampahan masih minim		Infrastruktur dan literasi digital rendah	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip	Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas

NO	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
	Jalur Lintas Selatan (Pansela)					pembangunan berkelanjutan	
5	Memiliki pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan	Belum optimalnya pengelolaan mitigasi bencana dan lingkungan hidup yang berkualitas Terjadinya krisis air bersih di beberapa wilayah karena kekeringan. Belum optimalnya koordinasi linmas	Pengelolaan sampah; Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pengelolaan kawasan hutan	Perubahan Iklim Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tangguh bencana untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah
6	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah dengan predikat sangat inovatif	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi	Perlunya peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Blitar Sulitnya masyarakat untuk	Tata Kelola Keuangan Global Pergeseran Kebijakan Fiskal, CBD, dan Fintech	Tata Kelola pemerintahan belum optimal Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital,	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik dan bermanfaat dengan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

NO	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
		dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah daerah		infrastruktur dan literasi digital masih terbatas	wawasan global dan tetap berkearifan lokal melalui kolaborasi governansi	

Sumber: Resntra Kecamatan Selorejo 2025-2029

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian target kinerja Sasaran RPJMD tersebut diatas, serta berdasarkan rumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah pada tabel 1.2 diatas, maka ditetapkan tujuan Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar adalah **“Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pelayanan Publik”** dengan sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan, Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang diukur melalui indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

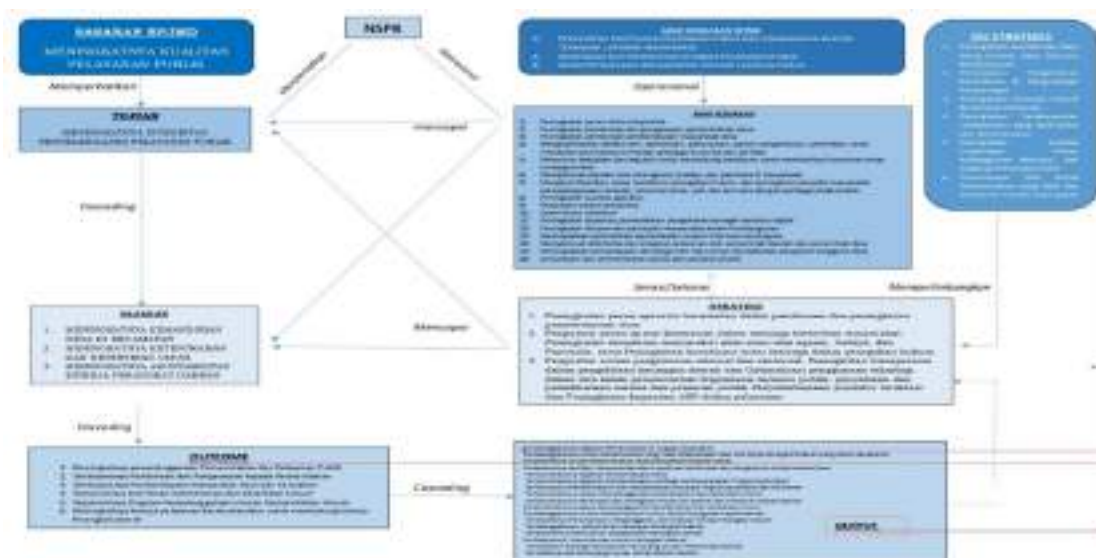
Table 1.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selorejo

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Presentase desa Mandiri di Kecamatan
2.	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP

Sumber : Kecamatan Selorejo, 2025

Logical Framework keselarasan hubungan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam cascading berikut:

Gambar 1.2. Cascading Kecamatan Selorejo



C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 3/A);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E);
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 126/E);
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 63/E);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 114/E).

D. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Penjelasan Umum Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja

B. Capaian Kinerja Organisasi

C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 maka ditetapkan target sasaran Perangkat Daerah yang perlu dicapai dan direalisasikan melalui penganggaran pada setiap tahunnya. Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang disusun berdasarkan target kinerja tahunan dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2021-2026 ke RPJMD 2025-2029. Pada awal tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita kedalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Berdasarkan surat tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berdampak pada perubahan perjanjian kinerja yang dimungkinkan menggambarkan kinerja yang berbeda karena adanya perubahan arah kebijakan, strategis dan prioritas pembangunan. Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan public sampai ke desa	Presentase keluhan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	93 %
2	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Presentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	95%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	68,96 (BB)
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Desa yang memiliki Administrasi Baik	85%
		Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik	7

Sumber : Kecamatan Selorejo, 2025

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Presentase desa Mandiri di Kecamatan	40%
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya angka Kriminalitas di Kecamatan	7
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD	Skor SAKIP	68,96

Sumber : Kecamatan Selorejo, 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja dari periode sebelum perubahan ke periode Perubahan pada Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Kecamatan Selorejo sebuah langkah strategis untuk merespons dinamika kebijakan nasional dan daerah. Dengan digelarnya pilkada serentak di tahun 2024 dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030, yaitu Drs. H. Rijanto, M.M. (Bupati) dan H. Beky Herdiansyah (Wakil Bupati), dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.

Sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 Penyusunan RPJMD dimulai paling lambat 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah. Kecamatan

Selorejo telah melaksanakan RENSTRA perubahan 2021-2026 dengan baik hal ini ditandai dengan telah disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan aturan tersebut menjadi dasar bagi kecamatan Selorejo untuk menyelaraskan tujuan pembangunan sesuai visi misi kepala daerah terpilih, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Penjelasan perubahan sasaran kinerja perangkat daerah sebagai berikut :

1. Sasaran **“Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa”** berubah menjadi sasaran **“Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan”**. Sesuai tupoksi kecamatan membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan. Sasaran ini bertujuan untuk agar desa mampu memenuhi kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan memajukan kesejahteraan warganya secara mandiri dengan memanfaatkan potensi lokal, kelembagaan, SDM, serta infrastruktur yang memadai, tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan luar, dan didukung oleh pemerintah melalui pemberdayaan berbasis UU Desa, untuk mencapai ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan.
2. Sasaran **“Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum”** berubah menjadi Sasaran **“Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum”**. Perubahan ini menunjukkan perubahan output yang ingin dicapai yakni angka kriminalitas. Keamanan dan ketertiban adalah dasar bagi berjalannya pembangunan dan kehidupan masyarakat yang fokus dalam landasan pencapaian kemajuan pembangunan. Kecamatan juga berperan dalam mengkoordinasikan berbagai pihak untuk menjaga keamanan wilayah sehingga diampu oleh Kasi Ketentram dan ketertiban dan Kasi Kesejahteraan Sosial.
3. Sasaran **“Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa”** ini ditiadakan. Dahulu sasaran ini diampu oleh Kasi pelayanan public. Dimana output dari pelayanan publik adalah hasil nyata yang diterima masyarakat setelah menerima layanan dari

pemerintah, berupa barang publik, jasa publik, atau pelayanan administratif (dokumen seperti KTP, KK, Akta), yang diukur dari kepuasan, kecepatan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta dapat berupa laporan resmi seperti survei kepuasan atau pengaduan yang menjadi indikator kinerja. Karena hasil pelayanan publik beririsan dengan akuntabilitas maka sasaran tersebut sekarang Melebur ke sasaran perubahan **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”**.

B. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.118.581.800,00 (Dua milyar seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana table 2.3

Tabel 2-3
Rincian Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 10.350.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 20.710.400,00
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 19.555.200,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 8.465.000,00
3	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.265.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 2.051.236.200,00
Total Anggaran			Rp. 2.118.581.800,00

Sumber : Kecamatan Selorejo, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Berikut analisis capaian kinerja pada Kantor Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Tahun 2025:

1. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan

Tingkat keberhasilan kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase Desa Mandiri di Kecamatan. Definisi Operasional

dari indikator Persentase Desa Mandiri di Kecamatan adalah
(Jumlah Desa Mandiri : Jumlah Desa di Kecamatan) x 100%

Rata-rata capaian kinerja/ Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan adalah 25 % sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 3.1
 Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	40 %	10 %	25 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					25 %

Sumber: Kecamatan Selorejo, 2025

Berdasarkan table 3.1 diatas, indikator presentase desa mandiri di kecamatan dapat direalisasikan sebesar 10 % dari target 40 % sehingga mendapat capaian 25 % . Hal ini menunjukkan Kecamatan Selorejo masih mampu membina 1 (satu) desa di wilayahnya untuk mempertahankan dan mencapai status “Mandiri”. berdasarkan kriteria Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu Desa Selorejo

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 dan teaja dari tahun 2024. Keterjagaan kinerja pada sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan dari tahun 2024 pada sasaran ini disebabkan oleh banyaknya Desa yang masih memiliki pemikiran cukup dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga tidak ada motivasi untuk meningkatkan PADes serta kurang optimanya desa dalam menginput Indeks Desa Membangun

Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025:

Tabel 3.2
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun n	Tahun n	Tahun n-1	Tahun n-2
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	40%	10 %	10 %	0%

Sumber: Kecamatan Selorejo

Selain itu capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari Renstra 2025-2029, yang berarti telah mencapai 10 % dari target tahun terakhir Renstra belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.3
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	100 %	10 %	10 %

Sumber: Kecamatan Selorejo

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Kecamatan Wates kabupaten Blitar, maka capaian ini masih lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan telah memberi dampak yang tidak signifikan dalam mencapai kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja dengan Kecamatan Wates.

Tabel 3.4
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/
Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kec. Wates Kab Blitar
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	10 %	25 %

Sumber: Kecamatan Selorejo 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar telah melakukan Upaya dalam

mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa Upaya yang dilakukan yaitu:

1. Sosialisasi Pembinaan dan evaluasi terkait Administrasi Desa
2. Mengoptimalkan Pendampingan Input Indeks Desa Membangun (IDM)
3. Penguatan Tata Kelola BUMDes dan Administrasi Desa
Memberikan bimbingan teknis secara rutin terkait manajemen usaha BUMDes agar mampu menyumbangkan PADesa yang signifikan. Hal ini didukung dengan fasilitas penyusunan Peraturan Desa dan administrasi tata pemerintahan desa yang tertib untuk memastikan akuntabilitas Pembangunan desa.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi/tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal/tidak optimal. Kendala dan terealisasi secara optimal/tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan adalah sebagai berikut.

1. Lemahnya Fungsi Pembinaan dan Pengawasan
Jumlah personel pada seksi pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa masih terbatas dibandingkan dengan beban kerja pembinaan 10 (sepuluh) desa. Hal ini mengakibatkan intensitas pendampingan pada beberapa desa belum dapat dilakukan secara harian, sehingga proses verifikasi data IDM terkadang mengalami antrian administratif.
2. Dinamika Partisipasi Masyarakat.
Pada beberapa desa, antusiasme masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan (Musrenbangdes) sudah tinggi, namun kapasitas dalam menerjemahkan usulan menjadi program ekonomi produktif yang mandiri masih memerlukan

bimbingan berkelanjutan agar tidak hanya terpaku pada pembangunan fisik.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran
Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Terlaksananya Fasilitas Rekomendasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Keberhasilan: Koordinasi rutin tentang kegiatan pemberdayaan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegagalan: Lemahnya fungsi pembinaan dan pengawasan
		Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kurangnya partisipasi Masyarakat Desa

Sumber: Kecamatan Selorejo 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran

Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan Adalah sebesar Rp. 31.060.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.808.000,00.

Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan:

Tabel 3.6
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	25 %	Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.350.000	1.350.000	100%
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.250.000	2.250.000	100%
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.250.000	2.250.000	100%
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.250.000	2.250.000	100%
			Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.250.000	0,00	100%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
			Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	8.500.200	8.499.000	99,99%
			Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.350.000	1.350.000	100 %
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.350.000	1.350.000	100 %
			kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
			Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	9.510.200	9.509.00	99,99%
			Realisasi Anggaran	31.060.400	28.808.000	92,75%
			Tingkat efisiensi	7,25 %		

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 25 % sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 92,75 %. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan Capaian realisasi kinerja dengan nilai efisiensi sebesar 7,25 %. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Dari total anggaran sebesar Rp. 31.060.400,00, realisasi sebesar Rp. 28.808.000,00 menunjukkan adanya efisiensi sebesar 7,25 % (Rp. 2.252.400,00). Penghematan ini berasal dari :

- Pembinaan sarana internal kantor untuk koordinasi pembinaan desa tanpa mengurangi frekuensi bimbingan teknis
- Distribusi materi pembinaan dan koordinasi dilakukan melalui media digital.
- Efisiensi anggaran juga dilakukan pada belanja makan minum rapat.

2. Efisiensi SDM

SDM menjadi lebih efisien karena monitoring dan evaluasi ke desa di bagi kedalam beberapa tim dengan jangkauan yang lebih luas

3. Efisiensi Waktu

Beberapa kegiatan sudah dilakukan secara daring dan koordinasi dan koordinasi dilakukan melalui media elektronik yang sangat efisien.

2. Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tingkat keberhasilan Kinerja sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum diukur melalui indikator menurunnya angka kriminalitas di kecamatan. Definisi operasional dari indikator menurunnya angka kriminalitas di kecamatan adalah Tingkat Kriminalitas = **(Total Kejahatan : Jumlah penduduk) x 100.000.**

Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum 116 % sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya angka Kriminalitas di Kecamatan	7	6	116.%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					116 %

Sumber: Kecamatan Selorejo , 2025

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, indikator Menurunnya angka Kriminalitas di Kecamatan Selorejo dapat terealisasi sebesar 6 realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum jauh lebih baik dari pada target yang ditetapkan sebesar 7 . Hasil ini mengklasifikasikan kinerja sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum ke dalam kategori Sangat Tinggi (Melampaui Target). Keberhasilan menekan angka kriminalitas hingga hanya terjadi 6 kasus dalam setahun merupakan bukti nyata efektivitas koordinasi intensif antara pihak Kecamatan dengan unsur Forkompimcam (Polsek dan Koramil) serta optimalnya peran tokoh masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah Kecamatan Selorejo

Realisasi Kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan kinerja lebih banyak disebabkan sinergitas Kecamatan, Desa/Kelurahan, TNI dan Polri yang semakin solid dalam menjaga kondusifitas wilayah Kecamatan Selorejo. Berikut perbandingan capaian Kinerja dari tahun 2023, 2024 dan tahun 2025:

Tabel 3.8
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya angka Kriminalitas di Kecamatan	7	6	8	9

Sumber: Kecamatan Selorejo,2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 33,33 % dari target tahun terakhir Renstra atau telah sesuai/belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2025. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.9
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan terhadap target akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya angka Kriminalitas di Kecamatan	2	6	33,33 %

Sumber: Kecamatan Selorejo 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Kecamatan wates maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang tidak signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada Kecamatan wates.

Tabel 3.10
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kecamatan wates
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya angka Kriminalitas di Kecamatan	6	2

Sumber: Kecamatan Selorejo 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan Komitmen dan koordinasi yang sudah berjalan baik antara Kecamatan, desa/kelurahan, TNI dan Polri

2. Pembentukan satuan tugas diseluruh wilayah kecamatan, untuk gerakan cepat yang anggotanya tertib dari desa yang sewaktu-waktu dapat membantu desa lain jika terjadi kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
3. Sosialisasi hukum sehingga masyarakat banyak yang sadar akan pentingnya ketaatan akan hukum.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal/tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut.

1. Masih adanya desa/kelurahan yang tidak melaporkan/terlambat melaporkan kepada Camat apabila ada kejadian
2. Terbatasnya personal dan seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengampu 10 desa
3. Banyaknya area yang kurang penerangan dan kurang aktifnya masyarakat dalam melaksanakan siskamling.

Tingkat keberhasilan kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase Desa Mandiri di Kecamatan. Definisi Operasional dari indikator Presentase Desa Mandiri di Kecamatan adalah **(Jumlah Desa Mandiri : Jumlah Desa di Kecamatan) x 100%**

Tabel 3.11
Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran
Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Adanya sinergitas dengan aparaturnya penegak hukum Adanya Sosialisasi hukum dan sehingga masyarakat banyak yang sadar akan pentingnya taat hukum
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Adanya Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan unsur kewilayahan

Sumber: Kecamatan Selorejo 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum adalah sebesar

Rp. 28.020.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.419.000,00
Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian
sasaran Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Tabel 3.12
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Ketentraman
Dan Ketertiban Umum

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum	116%	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.765.000	5.765.000	100%
			Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.350.000	1.350.000	100%
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.350.000	0,00	0
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
			Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	13.955.200	13.954.000	99,99%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.350.000	1.350.000	100 %
			Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4.250.000	0	-
			Realisasi Anggaran	28.020.200	22.419.000	80 %
			Tingkat efisiensi			30 %

Sumber: Kecamatan Selorejo, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 116 % sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 80 %. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan nilai efisiensi sebesar 30 %. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Penggunaan anggaran pada sasaran ini dikategorikan sangat efisien. Dengan serapan anggaran sebesar 80 %, Kecamatan Selorejo mampu menghasilkan Capaian kinerja 116%. Menghemat anggaran sebesar 30 % bersumber dari:

- Penghematan pada Makan belanja makan minum rapat

- Penghematan pada belanja jasa kantor atau narasumber kegiatan

2. Efisiensi SDM

Produktivitas SDM menunjukkan Tingkat efektifitas yang sangat tinggi melalui sinergitas Forpimcam. Meskipun jumlah personel trantib kecamatan terbatas, koordinasi yang solid dengan Polsek dan Koramil membuat beban pengawasan wilayah terbagi secara proporsional. Keberhasilan menekan angka kriminalitas membuktikan adanya peningkatan kompetensi aparatur dalam melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh masyarakat untuk menciptakan keamanan mandiri di tingkat desa (pos kamling)

3. Efisiensi Waktu

Beberapa kegiatan sudah dilakukan secara daring dan koordinasi dilakukan melalui grup whatsApp yang sangat efisien.

3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur melalui indikator Nilai SAKIP. Definisi operasional dari Indikator Nilai SAKIP adalah Penilaian Skore AKIP OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar 99 % sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	68,96	68,40	99 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					99 %

Sumber: Kecamatan Selorejo, 2025

Berdasarkan tabel 3.13 diatas, Indikator Nilai SAKIP dapat direalisasikan sebesar 68,40 dari target yang ditetapkan sebesar 68,96. Hal ini menunjukkan persentase capaian sebesar 99 %

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Nilai SAKIP mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja ini disebabkan oleh cerminan adanya komitmen berkelanjutan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Selorejo. Peningkatan sebesar 5 poin dari tahun 2024 ke 2025 Peningkatan kinerja ini disebabkan kerja keras dan kerjasama tim sakiip untuk memperbaiki dokumen perencanaan, pengukuran Kinerja, penyusunan pelaporan, mengevaluasi pelaksanaan. Selain itu juga hasil proses belajar terus menerus dan mengikuti pelatihan atau Bimtek perencanaan. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023-2025

Tabel 3.14
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	68,96	68,40	63,40	65,57
Dst						

Sumber: kecamatan selorejo

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 97,70 % dari target tahun terakhir Renstra atau telah belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2025. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra .

Tabel 3.15 Pencapaian kinerja sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	70	68,40	97,70 %

Sumber: Kecamatan Selorejo

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/ Nasional/Kabupaten/ Kota Tetangga maka capaian ini lebih rendah/ tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang tidak signifikan dalam mencapai kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Timur/ Nasional.

Tabel 3.16
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kecamatan Wates
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	NILAI SAKIP	68,40	71,9
Dst				

Sumber: Kecamatan Selorejo

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Kantor Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa Upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa Upaya yang dilakukan yaitu:

1. Perencanaan yang baik yang disesuaikan dengan kondisi lapangan
2. Pengukuran kinerja, masing-masing ASN membuat pengukuran kinerja sesuai perjanjian kinerja
3. Pelaporan kinerja, seluruh karyawan kecamatan membuat laporan kinerja yang disampaikan kepada pimpinan setiap triwulan.
4. Evaluasi Kinerja Rapat Koordinasi terkait Penyerapan anggaran dan kinerja yang dilakukan setiap triwulan, untuk mencari Solusi dari hambatan yang terjadi dilapangan.

Dari Seluruh Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi/ tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal/ tidak optimal. Kendala

dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap saki, sehingga membutuhkan persamaan persepsi dalam memahami saki.
2. Monev berjenjang atas dokumen saki belum optimal (Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)

Dalam menunjang keberhasilan keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran diatas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keberhasilan Sinergi yang kuat dengan Pemerintah Desa melalui rakor rutin bulanan sehingga usulan Musrenbang lebih berkualitas
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Keberhasilan: Efektivitas penanganan konflik sosial dan ketentraman wilayah melalui deteksi dini bersama tokoh masyarakat.

	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<p>Keberhasilan : Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading yang tajam meningkatkan kualitas dokumen SAKIP</p> <p>Hambatan: Adanya perubahan format pelaporan dari pusat di tengah tahun anggaran memerlukan waktu reviu tambaha</p>
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<p>Keberhasilan: Penyerapan anggaran yang tepat waktu dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan</p>
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	<p>Keberhasilan: Penerapan sistem disposisi digital yang mempercepat alur surat menyurat internal.</p>
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<p>Keberhasilan: Tersedianya sarana pendukung Zona Integritas (seperti perangkat IT dan media informasi</p>

				pelayanan).
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keberhasilan: Pemenuhan tenaga jasa sesuai Perbup yang menunjang mobilitas dan kebersihan kantor secara optimal.
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	persiapan perencanaan matang dan Koordinasi yang intens dengan bagian PBJ sehingga pengadaan, pemeliharaan dan penyediaan jasa kantor dapat terlaksnan dengan baik

Sumber: Kecamatan Selorejo

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 2.059.501.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.909.915.130 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.18
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	99 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.350.000	1.350.000	100 %
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.865.000	2.865.000	100%
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.350.000	1.350.000	100 %
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	1.350.000	1.350.000	100%
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	1.350.000	0,00	0
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.680.000	2.417.500	90,21%
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.180.000	1.653.000	75,83%
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.452.202.300	1.339.673.86 9	92,25%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.030.000	3.030.000	100%
			Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.880.000	2.880.000	100%
			Belanja Honorarium Penanggungjaw ab Pengelola Keuangan	8.640.000	8.640.000	100%
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	960.000	960.000	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.274.000	0,00	0

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.624.000	1.431.500	88,15%
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.350.000	0,00	0
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.976.400	4.563.500	91,70%
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.288.600	17.826.200	97,47%
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.289.200	3.669.000	85%
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.028.750	3.990.000	99,04%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.491.650	7.523.600	88,60%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.122.150	43.060.000	95,43%
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	13.478.100	13.031.400	95,69%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.643.400	84.920.550	81,94%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.354.200	1.980.000	84,11%
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.586.260	8.560.115.00	54,92%
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.940.000	4.850.000	81.65%
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.081.590	123.081.590	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	70.075.000	68.528.500	97,70%
			Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.000	3.990.000	98,28
			Sub kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.600	148.738.906,10	99,16%
			Realisasi Anggaran	2.059.501.200	1.905.915.130	92,54%
			Tingkat efisiensi			7,45%

Sumber: Kecamatan Selorejo

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan

sumber daya dalam mencapai sasaran capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 99% sedangkan realisasi anggaran diperoleh 92,54%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas Kinerja dengan nilai efisiensi 7,45%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

- Efisiensi di Anggaran Belanja ATK, Dimana kegiatan sudah sangat berkurang dalam penggunaan kertas
- Efisiensi di Anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik dimana penggunaan alat elektronik sudah sangat berkurang.
- Efisiensi Dalam Pengadaan Peralatan Rumah tangga.
- Efisiensi dalam Anggaran perjalanan dinas, dimana hanya kegiatan yang sangat butuh untuk diikuti saja.

2. Efisiensi SDM

- Keharmonisan hubungan kerja semakin baik sehingga setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan bersama sama.
- Subag penyusunan program dan keuangan di kecamatan selorejo memiliki staf sehingga pembagian kerja dapat dengan baik.

3. Efisiensi Waktu

- pelaksanaan kegiatan sangat efektif karena evaluasi triwulan terus dilaksanakan, dapat dilihat dalam realisasi anggaran tidak menumpuk di triwulan 4
- Kemudahan bekerja karena banyak pekerjaan yang dapat dilaksanakan dimana saja tidak perlu di kantor kecamatan karena sudah terhubung di internet.

B. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Untuk Tahun anggaran 2025 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.19
Realisasi Keuangan

No.	Sasaran	Realisasi Kinerja	Program	Anggaran		
				Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	25 %	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.350.000	8.100.000	78,26
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.350.000	8.100.000	78,26
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.350.000	1.350.000	100
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.250.000	2.250.000	100
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.250.000	2.250.000	100
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.250.000	2.250.000	100
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.250.000	0	0
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.710.400	20.708.000	99,99
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.200.200	11.1990.000	99,99
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.500.200	8.499.000	99,99

			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.350.000	1.350.000	100
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.350.000	1.350.000	100
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	9.510.200	9.509.000	99,99
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	9.510.200	9.509.000	99,99
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	116 %	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.555.200	15.304.000	78,26
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.555.200	15.304.000	78,26
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	13.955.200	13.954.000	99,99
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4.250.000	0,00	0
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.350.000	1.350.000	100
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.465.000	7.115.000	84,05
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.115.000	7.115.000	100

			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.765.000	5.765.000	100
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.350.000	1,350.000	100
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.350.000	0,00	0
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.350.000	0,00	0
3	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja PD	99%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8.265.000	6.915.000	83,67
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.215.000	4.215.000	100
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.350.000	1.350.000	100
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.865.000	2.865.000	100
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	2.700.000	2.700.000	100

			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.350.000	1.350.000	100
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.350.000	1.350.000	100
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.350.000	0	0
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	1.350.000	0	0
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	2.051.236.200	1.899.000.130,10	92,58
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.860.000	4.070.500	83,76
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.680.000	2.417.500	90,21
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.180.000	1.653.000	75,83
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.471.610.300	1.356.615.369	92,25
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.452.202.300	1.339.673.869	92,25
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.030.000	3.030.000	100
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.520.000	11.520.000	100
			Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.880.000	2.880.000	100
			Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	8.640.000	8.640.000	100

			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	960.000	960.000	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.274.000	0	0
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.624.000	1.431.500	88,15
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.350.000	0	0
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.350.000	0	0
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.196.750	80.633.200	94,64
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.976.400	4.563.500	91,70
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.288.600	17.826.200	97,47
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.289.200	3.669.900	85,56
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.028.750	3.990.000	99,04
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.491.650	7.523.600	88,60
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.122.150	43.060.000	95,43
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.121.500	97.951.950	83,63
			Pengadaan Mebel	13478100	13031400	96,69
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.643.400	84.920.550	81,94
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.962.050	138.471.705	94,22
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.354.200	1.980.000	84,11
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.586.260	8.560.115	54,92

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.940.000	4.850.000	81,65
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.081.590	123.081.590	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.135.600	221.257.406,1	98,72
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.075.000	68.528.500	97,79
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.000	3.990.000	98,28
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.600	148.738.906,1	99,16
			Realisasi Anggaran	2.118.581.800	1.957.142.130,1	

Sumber: Kecamatan Selorejo 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas makan dijelaskan tentang permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam realisasi keuangan serta langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut sebagai berikut :

a. Kendala

- Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- Adanya efisiensi anggaran di awal tahun sehingga harus menyesuaikan target dan anggaran belanja beberapa kegiatan.
- Masa transisi pergantian renstra 2021-2026 dengan renstra 2025 – 2029

b. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi

- Menyusun rencana kerja sebelum perubahan sebagaimana amanat Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025.
- Melakukan efisiensi sesuai petunjuk terutama untuk perjalanan dinas.
- Menyesuaian target dan sasaran sesuai amanat renstra 2025-2029 pada saat perubahan Anggaran.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan dengan melihat pengelompokan nilai dan predikat kinerja sebagai berikut.

Tabel 4.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kesimpulan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Selorejo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Presentase Desa Mandiri	25 %	25 %	Sangat Rendah
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan	116 %	116 %	Sangat Tinggi

3.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	99 %	99 %	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian kinerja PD			80 %	Tinggi

Sumber Kecamatan Selor

B. Rencana Tindak Lanjut

Pada pembahasan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian desa di kecamatan belum tercapai sesuai target, sehingga untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan pada Kecamatan Selorejo. Berikut rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja dan kendala yang dihadapi

Tabel 4.3
Rencana Tindak Lanjut

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Presentase Desa Mandiri	<p>Pendampingan secara intensif dalam penyusunan RKPDes, memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan pembangunan desa yang berkembang disertai adanya petunjuk teknis penyusunan RKPDesa yang lengkap.</p> <p>Melakukan pendampingan khusus pada desa-desa yang memiliki potensi namun masih terkendala pada pilar ketahan lingkungan.</p> <p>Meningkatkan kedisiplinan aparatur desa diantaranya dengan cara pembinaan rutin ke desa-desa serta pemberian reward dan punishment.</p>

2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan	Memperkuat pola Patroli Sinergitas Forkopimcam secara terjadwal untuk mempertahankan angka kriminalitas di level minimal
			Meningkatkan Frekuensi dialog dan harmonisasi dengan tokoh Masyarakat melalui forum diskusi lintas sektor untuk mencegah potensi konflik horizontal
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	Mempersiapkan Dokumen perencanaan yang lebih teliti dan konsisten serta meningkatkan kualitas pengukuran, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal secara mandiri dan berkala agar nilai SAKIP dapat mencapai target akhir Renstra.

Sumber : Kecamatan Selorejo

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Pohon Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029
- D. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029

	Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perawatan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kesadaran Pangan Keluarga	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
				Jumlah Dokumen Perangkat Daerah			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	

KINERJA OPERASIONAL

PK STAF SEKSI (KEGIATAN WAJIB)

PK STAF SUBBAG (KEGIATAN PENUNJANG)

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saine		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permisyawaratan Desa		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkerjasama dan Pengembangan Ekonomi Lainny		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDRO RIYADI, S.Sos.MM**

Jabatan : CAMAT SELOREJO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. RINI SYARIFAH**

Jabatan : BUPATI BLITAR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Hj. RINI SYARIFAH

Blitar, 31 Januari 2025

Pihak Pertama,



ENDRO RIYADI, S.Sos.MM

Pembina Tk.I

NIP.19721106 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	93 %
2.	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	95 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	68,96 (BB)
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Baik	85 %
		Jumlah Bumdes yang di kelola dengan baik	7

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM UTAMA			
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.265.000,00	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 22.585.400,00	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 8.465.000,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 22.420.200,00	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 18.615.000,00	APBD
PROGRAM PENUNJANG			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 2.231.679.144,00	APBD
JUMLAH		Rp. 2.312.029.744,00	



Blitar, 31 Januari 2025
Camat Selorejo

ENDRO RIYADI, S.Sos.MM
Pembina Tk.I
NIP.19721106 199203 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUNG NUGROHO SUTAMAT, S.E.M.M**

Jabatan : CAMAT SELOREJO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs RIJANTO, M.M**

Jabatan : BUPATI BLITAR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 8 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Drs. RIJANTO, .M.M


AGUNG NUGROHO SUTAMAT, S.E.M.M

Penata Tingkat.I

NIP.19780825 200212 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR**

NO <i>(1)</i>	Sasaran Strategis <i>(2)</i>	Indikator Sasaran <i>(3)</i>	Target <i>(4)</i>
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	40 %
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan	7
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Skor AKIP	68,96

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM UTAMA			
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.265.000,00	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 20.710.400,00	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 4.215.000,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 19.555.200,00	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 10.350.000,00	APBD
PROGRAM PENUNJANG			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 2.055.486.200,00	APBD
JUMLAH		Rp. 2.118.581.800,00	

Bupati Blitar

Drs. RIJANTO, M.M

Blitar, 8 September 2025

Camat Selorejo

AGUNG NUGROHO SUTAMAT, S.E.MM

Penata Tingkat I

NIP.19780825 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN SELOREJO

Jln. Raya Selorejo No. 27 Selorejo Blitar Telp. (0342) 331350
Pos-el : kec-selorejo@blitarkab.go.id / website : www.kec-selorejo.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SELOREJO KABUPATEN BLITAR
NOMOR : B/188.47/16/409.48/KPTS/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR
CAMAT SELOREJO KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Selorejo, serta pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, maka Kantor Kecamatan Selorejo, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ;
- b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Selorejo,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah 10/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SELOREJO KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT SELOREJO KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025-2029
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Camat Selorejo, Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Camat Selorejo, Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Selorejo, Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Selorejo, Kabupaten Blitar.
- KEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

pada tanggal : 10 September 2025



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
KECAMATAN : SELOREJO**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	40 %
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan	20.04
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	68,96

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Target Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Persentase	$= (\sum \text{Desa Mandiri}) / (\sum \text{Desa di Kecamatan}) \times 100\%$ Website IDM / PMD	40 %
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	$\text{Angka kriminalitas} = (\sum \text{kriminalitas tahun } n) / (\sum \text{penduduk tahun } n) \times 100.000$ (Sumber : Polsek (\sum kriminalitas) / BPS Kecamatan dalam angka (rilisnya tahun berikutnya))	20.04
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	Penilaian Skore AKIP OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	68,96


AGUNG NUROHIC SUTAMAT, SE.MM
 Camat Selorejo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar
 NIP. 19780825 200212 1 001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SELOREJO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT SELOREJO
KABUPATEN BLITAR**

- Nama OPD : KANTOR CAMAT SELOREJO
- Tugas : 1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- Fungsi : a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Target Tahun	Program	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Persentase	$= (\sum \text{Desa Mandiri}) / (\sum \text{Desa di Kecamatan}) \times 100\%$ Website IDM / PMD	40 %	- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	Angka kriminalitas $= (\sum \text{kriminalitas tahun } n / \sum \text{penduduk tahun } n) \times 100.000$ (Sumber : Polsek (diutamakan)/ BPS Kecamatan dalam angka (rilisnya tahun berikutnya))	20.04	- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	Penilaian Skore AKIP OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	68,96	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

CAMAT SELOREJO



AGUNG NUGRHO SUTAMAT, SE.MM
CAMATAN Selorejo Tingkat I
N.P. 19780825 200212 1 001

**RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2025
KECAMATAN SELOREJO**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target dan Anggaran		Jadwal Kegiatan												Penanggung Jawab	Keterangan
						Tribulan I			Tribulan II			Tribulan III			Tribulan IV				
						1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	2.231.679.144,00														
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100	5.340.000,00														
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	2.680.000,00									2.680.000,00				Kassubag Sungram	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	2.660.000,00									2.660.000,00				Kassubag Sungram	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabe	100	1.574.653.244,00														
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1.554.285.244,00	1.243.428.195,20						310.857.048,80						Kassubag Sungram	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	3.030.000,00				505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00				Kassubag Sungram	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	11.520.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00		Kassubag Sungram	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14	1.920.000,00									1.920.000,00				Kassubag Sungram	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2.274.000,00											2.274.000,00		Kassubag Sungram	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	1.624.000,00									1.624.000,00				Kassubag Sungram	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan optimal, efektif, dan efrsien	100	1.350.000,00														
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	1.350.000,00									1.350.000,00				Kassubag Sungram	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30	-														
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	95.018.000,00													Kasi Pelayanan Publik	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14	95.018.000,00				95.018.000,00										Kassubag Sungram
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabe	100	85.074.672,00														
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	4.976.400,00									4.976.400,00				Kassubag Sungram	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22	13.511.100,00	5.800.500,00			2.915.000,00			2.944.000,00		841.600,00	505.000,00	505.000,00		Kassubag Sungram	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	4.289.200,00									4.289.200,00				Kassubag Sungram	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	4.028.750,00				1.386.750,00					2.642.000,00				Kassubag Sungram	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan	4	6.931.350,00				1.646.400,00					5.284.950,00				Kassubag Sungram	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	4	51.337.872,00	4.217.000,00			#####			17.250.872,00		7.130.000,00				Kassubag Sungram	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD	12	0														
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100	81.480.600,00														
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	16.213.800,00									16.213.800,00				Kassubag Sungram	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	65.266.800,00									65.266.800,00				Kassubag Sungram	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	2.250.000,00										2.250.000,00			Kasi Pemerintahan
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1	2.250.000,00											2.250.000,00		Kasi Pemerintahan
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	2.250.000,00											2.250.000,00		Kasi Pemerintahan
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10	0													
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10	0													
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	0													
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	0													
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	2.250.000,00										2.250.000,00			Kasi Pemerintahan
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	2.250.000,00											2.250.000,00		Kasi Pemerintahan
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	2.250.000,00										2.250.000,00			Kasi Pemerintahan
		JUMLAH		2.312.029.744,00													

Selorejo, 2 Januari 2025

CAMAT SELOREJO



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 30 NOVEMBER TAHUN 2025
KECAMATAN SELOREJO

KECAMATAN SELOREJO

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target dan Anggaran										Penanggung Jawab
				Target	Rp	Tribulan I		Tribulan II		Tribulan III		Tribulan IV		
						Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	2,055,486,200.00	398,314,500.00								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100	4,860,000.00	-								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	2,680,000.00	-						2,417,500.00	90.21	Kassubag Sungram
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	2,180,000.00	-							-	Kassubag Sungram
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabe	100	1,471,610,300.00								-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1,452,202,300.00	395,434,500.00	27.23	356,823,966.00	24.57	277,232,895.00	19.09	183,632,111.00	12.65	Kassubag Sungram
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	3,030,000.00			1,515,000.00	50.00	-	-	1,515,000.00	50.00	Kassubag Sungram
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	11,520,000.00	2,880,000.00	25.00	2,880,000.00	25.00	7,680,000.00	66.67	960,000.00	8.33	Kassubag Sungram
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14	960,000.00						-	-	-	Kassubag Sungram
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2,274,000.00						-	-	-	Kassubag Sungram
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	1,624,000.00						-	-	-	Kassubag Sungram
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan optimal, efektif, dan efisien	100	1,350,000.00						-	-	-	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	1,350,000.00						-	-	-	Kassubag Sungram
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30								-	#DIV/0!	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	-						#DIV/0!	-	#DIV/0!	Kasi Pelayanan Publik
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14	-						#DIV/0!	-	#DIV/0!	Kassubag Sungram
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabe	100	89,446,750.00						-	-	-	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	4,976,400.00						-	2,247,000.00	45.15	Kassubag Sungram
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22	18,288,600.00	5,678,700.00	31.05	2,915,000.00	15.94	11,533,700.00	63.06	6,292,500.00	34.41	Kassubag Sungram
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	4,289,200.00						-	1,989,400.00	46.38	Kassubag Sungram
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	4,028,750.00			1,372,000.00	34.06	1,372,000.00	34.06	2,618,000.00	64.98	Kassubag Sungram
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	8,491,650.00			1,645,000.00	19.37	1,645,000.00	19.37	3,948,000.00	46.49	Kassubag Sungram
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	49,372,150.00	4,190,000.00	8.49	9,992,000.00	20.24	26,700,000.00	54.08	3,250,000.00	6.58	Kassubag Sungram
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	-							-	#DIV/0!	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100	117,121,500.00						-	-	-	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	13,478,100.00						-	-	-	Kassubag Sungram
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	103,643,400.00						-	-	-	Kassubag Sungram
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100	146,962,050.00						-	-	-	Kassubag Sungram
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2,354,200.00			1,980,000.00	84.11	1,980,000.00	84.11		-	Kassubag Sungram
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	15,586,260.00	1,956,408.00	12.55	2,052,823.00	13.17	5,363,107.00	34.41	657,854.00	4.22	Kassubag Sungram
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	5,940,000.00					2,900,000.00	48.82		-	Kassubag Sungram
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	123,081,590.00	33,291,000.00	27.05	36,436,134.00	29.60	85,130,180.00	69.17	8,871,000.00	7.21	Kassubag Sungram
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah w aktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	224,135,600.00						-	-	-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	-								#DIV/0!	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	70,075,000.00	16,840,000.00	24.03	6,995,000.00	9.98	27,286,000.00	38.94	6,556,000.00	9.36	Kassubag Sungram
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	4,060,000.00						-		-	Kassubag Sungram
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	150,000,600.00						-	70,921,453.05	47.28	Kasi Pelayanan Publik
	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	5	8,265,000.00						-	-	-	

		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang diselenggarakan di tingkat kecamatan Persentase Desa/Kelurahan dengan desa peringkat IKM terbaik	5	4,215,000.00							-	-	-	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	1,350,000.00							-	-	-	Kasi Pelayanan Publik
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2,865,000.00							-	-	-	Kasi Pelayanan Publik
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan yang dilaksanakan	2	2,700,000.00							-	-	-	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		1,350,000.00							-	-	-	Kasi Pelayanan Publik
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1,350,000.00							-	-	-	Kasi Pelayanan Publik
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	20	1,350,000.00							-	-	-	Kasi Pelayanan Publik
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20	1,350,000.00							-	-	-	Kasi Pemberdayaan
	Meningkatkan kemandirian desa dan kelurahan di wilayah kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	10	20,710,400.00							-	-	-	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10	11,200,200.00							-	-	-	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	8,500,200.00	6,984,000.00	82.16	1,515,000.00	17.82	8,499,000.00	99.99	-	-	-	Kasi Pemberdayaan
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10	1,350,000.00			1,350,000.00	100.00	1,350,000.00	100.00	-	-	-	Kasi Pemberdayaan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	1,350,000.00			1,350,000.00	100.00	1,350,000.00	100.00	-	-	-	Kasi Pemberdayaan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2	9,510,200.00							-	-	-	
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	4	9,510,200.00							-	-	-	Kasi Pemberdayaan
	Menurunkan jumlah pelanggaran di kecamatan	Program Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	2	4,215,000.00							-	-	-	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	2,865,000.00							-	-	-	

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10	1,515,000.00							-	-	4,250,000.00	280.53	Kasi Trantib	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	1,350,000.00							-	-	1,350,000.00	100.00	Kasi Trantib	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkada yang dilakukan	10	1,350,000.00							-	-	-	-		
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	1,350,000.00							-	-	-	-	Kasi Kesos	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	100	19,555,200.00							-	-	-	-		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	5	19,555,200.00							-	-	-	-		
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana	75	-							#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	Kasi Kesos	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1	-									-	#DIV/0!		
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4	13,955,200.00							-	13,954,000.00	99.99	-	-	Kasi Kesos
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75	4,250,000.00							-	-	-	-	Kasi Kesos	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1,350,000.00							-	1,350,000.00	100.00	-	-	Kasi Kesos
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	50	10,350,000.00							-	-	-	-		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah rekomendasi dan pengawasan yang dilakukan	5	10,350,000.00							-	-	-	-		
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	1,350,000.00							-	-	1,350,000.00	100.00	Kasi Pemerintahan	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	2,250,000.00							-	-	2,250,000.00	100.00	Kasi Pemerintahan	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	2,250,000.00							-	-	2,250,000.00	100.00	Kasi Pemerintahan	

	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1	-				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	Kasi Pemerintahan
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	2,250,000.00				-		-	2,250,000.00	100.00	Kasi Pemerintahan
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10	-								#DIV/0!	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10	-							-	#DIV/0!	
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	-							-	#DIV/0!	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	-							-	#DIV/0!	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	-				#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	Kasi Pemerintahan
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	2,250,000.00				-		-	-	-	Kasi Pemerintahan
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	-				#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	Kasi Pemerintahan
		JUMLAH		2,118,581,800.00	467,254,600.00	22.06	428,821,923.00	20.24	475,325,882.00	22.44	309,575,818.05	14.61	

Selorejo, 30 November 2025


AGUNG NUGROHO SUTAMAT, BE, MM
 Pembina
 NIP.19780825 200212 1 001

